



Abstrak

Azhari Nardi, NIM: 21492106551, PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr), tesis Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Suatu perkawinan yang tidak sah, wajib hukumnya dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan maka hubungan keduanya dipandang sebagai bagian dari perzinahan. Adapun perkawinan yang harus dibatalkan dipicu oleh faktor-faktor fundamental yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak layak terjadi, yaitu suatu perkawinan tidak mencukupi salah satu atau lebih dari rukun dan syaratnya, atau rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi namun terdapat *mani'* (faktor penghalang menurut syariat). Pembatalan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut dengan *fasakh*. Peristiwa ini sering terjadi di masyarakat, di antaranya di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. Dalam hal putusan, antara dua lembaga hukum ini terjadi perbedaan signifikan. Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr menolak gugatan pembatalan perkawinan, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr mengabulkan gugatan tersebut.

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. dan buku-buku fikih terkait dengan hukum Islam. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan pembahasan.

Tesis ini menyimpulkan bahwa perbedaan Putusan antara hakim dua lembaga hukum tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum. Persamaannya adalah Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA, sama-sama mengakui penggugat I dan II sebagai pihak yang berkapasitas untuk pengajuan gugatan pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2015/PTA terlalu normatif sehingga dengan mudah mengkategorikan tindakan manipulatif data oleh tergugat II sebagai tindakan melawan hukum dan adanya i'tikad tidak baik sehingga dari fakta ini disimpulkan tidak mungkin terjadinya rumah tangga yang harmonis. Sedangkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. menilai tindakan manipulatif status "jejaka" tersebut tidak sebagai faktor fundamental yang implikatif terhadap pembatalan perkawinan, terutama berdasarkan fakta bahwa pernikahan mereka langgeng selama lebih kurang dua puluh tahun.



ABSTRACT

Azhari Nardi (2018): The Cancellation of Marriage in the Perspectives of Islamic Law: (An Analysis of Decision of Religious Court of Pekanbaru Number: 0568 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr and Decision of High Court of Religious of Pekanbaru Number: 0066 / Pdt.G / 2015 / PTA.Pbr)

Unauthorized marriage must be canceled. If it is not canceled, the relationship is considered adultery. The marriage to be canceled is triggered by the fundamental factors that cause the marriage to be unfit to occur due to inadequate one or more of the pillars and terms of marriage, or the pillars and conditions are met but there is a *mani'* (Shariah barrier factors). The cancellation of marriage in Islamic legal terms is called *fasakh*. This event often occurs in the community, some of them are in the Religious Court of Pekanbaru in Decision Number: 0568 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr, and the Religious High Court of Pekanbaru in Decision Number: 0066 / Pdt.G / 2015 / PTA.Pbr. In both decisions, there are significant differences. The Religious Court of Pekanbaru in Decision Number 0565 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr rejects the lawsuit of the cancellation of marriage, while the High Court of Religion of Pekanbaru in the decision Number 0066 / Pdt.G / 2015 / PTA.Pbr to grant the lawsuit.

This research is a Library Research, which uses literature sources to discuss the problems that have been formulated. This method starts with collecting primary data as the basis of this research and using other data derived from secondary data relating to the theme of this writing. Based on the field of study, this type of research is Legal Research that is normative. The data collected consist of written materials that have been published in the form of books, magazines, research results, and the internet, which is directly or indirectly related to this research. The main sources of this research are the Decision of the Religious Courts of Pekanbaru No. 0568 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr and the Decision of the Religious High Court of Pekanbaru Number: 0066 / Pdt.G / 2015 / PTA.Pbr and books of jurisprudence related to Islamic Law. While the secondary data are the books that have a correlation and relevance to the discussion.

This thesis concludes that in these two decisions, there are similarities and differences of legal considerations. The equation is in Decision Number: 0568 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr. and in Decision Number 0066 / Pdt.G / 2015 / PTA, both acknowledge claimant I and II as the party with the capacity to file a marriage cancellation lawsuit. While the difference is in the decision Number 0066 / Pdt.G / 2015 / PTA which is too normative so it categorizes the data manipulating action by the defendant II as an act against the law and the existence of *i'tikad* which is not good. So, from this fact, it is concluded that it is impossible for a household to be harmonious. While in Decision Number: 0568 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr, it assessed the manipulative action of the "trace" status as not a fundamental factor in the annulment of marriage, primarily based on the fact that their marriage lasted for over twenty years.